Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN RABAT BETON DI DESA RENDU TUTUBHADA KECAMATAN AESESA SELATAN

Petrus Emanuel Tewa[1], Belandina Long[2], Maria M. Lino[3]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia[1,2,3]
Email: Petrusemanuelsesa@gmail.com[1]

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur desa yang berbasis kemandirian lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pembangunan jalan rabat beton di Desa Rendu Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci yakni pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemikiran atau gagasan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sudah berjalan dengan tersedianya ruang evaluasi dan kritik, meskipun keterlibatan dalam usulan program secara substantif masih didominasi aktor-aktor tertentu. Sebaliknya, partisipasi dalam bentuk tenaga menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi yang didorong oleh semangat gotong royong serta kesadaran akan kebutuhan fasilitas transportasi pertanian. Faktor pendorong utama keterlibatan ini adalah pemberian kesempatan yang inklusif oleh pemerintah desa dan kemauan internal masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi keterbatasan waktu akibat prioritas pemenuhan ekonomi keluarga dan minimnya pendapatan swadaya masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan strategi komunikasi persuasif dari pemerintah desa guna menjaga konsistensi partisipasi masyarakat di masa mendatang.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Rabat Beton, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat.*

ABSTRACT

Community participation is a crucial element in the success of rural infrastructure development based on local self-reliance. This study aims to analyze the forms of community participation and identify the driving and inhibiting factors in the construction of concrete slab roads in Rendu Tutubhada Village, South Aesesa District, Nagekeo Regency. Using a qualitative descriptive method, data were collected through direct observation, in-depth interviews with key informants namely the village government and community leaders, and documentation study. The results show that community participation in terms of thoughts or ideas in the Village Development Planning Forum (Musrenbangdes) has been implemented by

providing space for evaluation and criticism, although involvement in program proposals substantively remains dominated by certain actors. Conversely, participation in the form of labor shows very high enthusiasm driven by the spirit of mutual cooperation (gotong royong) and awareness of the need for agricultural transportation facilities. The main driving factors for this involvement are the provision of inclusive opportunities by the village government and the internal willingness of the community. Meanwhile, the inhibiting factors identified include time constraints due to the priority of meeting family economic needs and the lack of independent community financial income. This study recommends the need to improve persuasive communication strategies from the village government to maintain the consistency of community participation in the future.

Keywords: *Community Participation, Village Development, Concrete Road, Driving Factors, Inhibiting Factors.*

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah pedesaan merupakan pilar strategis dalam struktur ketahanan nasional sekaligus instrumen utama bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Secara historis, paradigma pembangunan di Indonesia sering kali terjebak dalam pendekatan top-down yang menempatkan pemerintah pusat atau daerah sebagai penentu tunggal kebijakan, sementara masyarakat desa hanya diposisikan sebagai konsumen pasif dari hasil-hasil pembangunan.

Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai pergeseran paradigma yang revolusioner dari "pembangunan di desa" menjadi "desa membangun." Regulasi ini memberikan rekognisi dan asas subsidiaritas yang kuat, di mana desa diberikan kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri berbasis prakarsa lokal.

Dalam kerangka teoretis sosiologi pembangunan, pergeseran ini mengadopsi konsep man-centered development, sebuah pendekatan yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya indikator fisik material, melainkan dari sejauh mana kapasitas manusia meningkat dan dilibatkan sebagai subjek utama.

Esensi dari pembangunan partisipatif ini terletak pada peleburan yang harmonis antara intervensi kebijakan pemerintah desa (*state-driven development*) dan mobilisasi swadaya serta kesadaran kolektif yang tumbuh secara organik dari dalam rahim masyarakat itu sendiri (*community-led development*).

Tanpa adanya keterlibatan aktif warga, setiap proyek pembangunan yang dikucurkan ke desa berisiko mengalami kegagalan struktural, penolakan sosial, atau kehilangan fungsi keberlanjutannya pasca-proyek selesai dikerjakan.

Dalam ruang lingkup geografis pedesaan, sektor infrastruktur

transportasi, khususnya ketersediaan aksesibilitas jalan yang memadai, memegang peranan yang sangat vital dan tidak dapat ditawar. Jalan bukan sekadar bentangan semen atau aspal, melainkan urat nadi perekonomian yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian dengan pasar mobilitas sosial.

Infrastruktur jalan yang buruk di wilayah pedesaan terbukti menjadi faktor utama yang melanggengkan isolasi geografis, memperpanjang rantai pasok logistik, meningkatkan biaya transportasi secara signifikan, serta membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik dasar seperti pusat kesehatan dan lembaga pendidikan.

Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Desa Rendu Tutubhada yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, mengambil langkah strategis dengan merealisasikan alokasi Dana Desa sebesar Rp128.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran tersebut diwujudkan melalui proyek pembangunan jalan rabat beton dengan volume fisik sepanjang 200 meter dan lebar 2 meter. Secara spasial, intervensi kebijakan ini diarahkan secara spesifik untuk memecah kebuntuan akses transportasi antar-dusun, terutama interkoneksi mobilitas antara Dusun Paupada dan Dusun Tasikapa. Kedua wilayah dusun ini memiliki potensi komoditas pertanian yang sangat melimpah, namun selama bertahun-tahun perkembangannya tersandera oleh kondisi jalan tanah yang rusak parah, berlumpur saat musim hujan, dan berdebu ekstrem saat musim kemarau, sehingga menyulitkan para petani lokal dalam memasarkan hasil bumi mereka ke pusat keramaian di Kabupaten Nagekeo.

Namun demikian, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur berbasis dana transfer pusat ini tidak jarang menghadapi benturan realitas yang kompleks di tingkat tapak. Meskipun secara regulatif pemerintah desa diwajibkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusivitas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dinamika empiris sering kali menunjukkan adanya jurang pemisah (*gap*) antara das Sollen (apa yang seharusnya) dan das Sein (apa yang senyatanya terjadi).

Berdasarkan penelusuran rekam jejak pembangunan pada periode-periode anggaran sebelumnya di Desa Rendu Tutubhada, sempat muncul gejala apatisme sosial di kalangan masyarakat akar rumput. Gejala ini berakar dari kekecewaan historis di mana proses perencanaan pembangunan dinilai kurang transparan, sarat akan bias kepentingan politik patronase lokal, serta adanya dominasi elite desa (*elite capture*) dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sering kali ditemukan masalah ketidakselarasan kronologis, di mana penentuan waktu pelaksanaan

pengerjaan fisik proyek desa diputuskan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kalender musim tanam dan musim panen para petani, sehingga mengabaikan ketersediaan waktu luang warga. Pengalaman masa lalu tersebut menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap proyek jalan rabat beton yang baru saja dilaksanakan ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengupas secara tuntas dan komprehensif mengenai bagaimana bentuk nyata dari partisipasi masyarakat, yang dipetakan ke dalam wujud kontribusi pemikiran (gagasan) serta kontribusi fisik (tenaga kerja) selama siklus pembangunan berlangsung, sekaligus mengidentifikasi secara detail apa saja faktor pendorong internal-eksternal yang menstimulasi keterlibatan warga serta faktor penghambat apa saja yang masih menjadi perintang dalam optimalisasi gerakan swadaya masyarakat di Desa Rendu Tutubhada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diarahkan untuk mengupas, memahami, dan menginterpretasikan secara mendalam dinamika sosial serta fenomena administratif terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan rabat beton. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna di balik tindakan, hubungan interpersonal antar-aktor, serta realitas kontekstual di lokasi penelitian secara alamiah tanpa memanipulasi variabel di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan secara intensif di Desa Rendu Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus analisis terarah pada dua substansi utama, yakni bentuk partisipasi masyarakat (meliputi aspek buah pikiran dan kontribusi tenaga kerja fisik) serta identifikasi komprehensif terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi intensitas keterlibatan warga desa tersebut.

Penentuan informan di dalam penelitian ini didasarkan pada teknik penarikan sampel bertujuan (*purposive sampling*) guna memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari subjek yang benar-benar memahami, mengalami, dan memiliki otoritas serta keterlibatan langsung dalam siklus pembangunan infrastruktur desa.

Informan kunci (key informants) yang ditetapkan dalam studi ini meliputi Kepala Desa Rendu Tutubhada selaku pengambil kebijakan tertinggi, Sekretaris Desa selaku koordinator teknis administrasi, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku representasi pengawasan masyarakat, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan kelompok tani yang terlibat langsung dalam kerja lapangan padat karya tunai pengerjaan jalan rabat beton tersebut. Penggunaan variasi informan ini bertujuan untuk menghindari bias

informasi dan menghasilkan sudut pandang yang seimbang antara aparatur birokrasi tingkat desa dengan elemen masyarakat akar rumput.

Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi langsung dan wawancara mendalam (in-depth interview). Observasi lapangan dilakukan secara non-partisipan dengan mengamati secara saksama aktivitas fisik gotong-royong warga, kualitas hasil pengecoran, serta pemanfaatan teknologi mesin mekanis (molen) di lokasi proyek jalan antardusun tersebut.

Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang fleksibel guna menggali narasi, persepsi, dan keluhan laten dari para informan mengenai transparansi forum perencanaan dan hambatan ekonomi domestik yang mereka hadapi. Untuk memperkuat keabsahan data primer, teknik studi dokumentasi juga diterapkan sebagai instrumen pengumpulan data sekunder melalui penelaahan berkas formal desa yang meliputi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), daftar hadir resmi dan notulensi Musrenbangdes, serta laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Dana Desa senilai Rp128.000.000.

Keabsahan dan keandalan data kualitatif dalam penelitian ini diuji secara ketat melalui penerapan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan menyilangkan data hasil wawancara antara satu informan dengan informan lainnya, seperti mengonfirmasi pernyataan Kepala Desa mengenai asas inklusivitas kebijakan dengan kesaksian riil kelompok tani di lapangan.

Triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan dan mengecek konsistensi data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi lapangan, serta bukti otentik yang tertera dalam dokumen laporan desa. Setelah seluruh data dinyatakan valid dan kredibel, proses analisis data dilakukan dengan mengadopsi model interaktif dari Miles dan Huberman, yang berjalan secara sirkuler dan simultan sejak awal hingga akhir riset.

Tahapan analisis ini meliputi reduksi data untuk memilah, memfokuskan, dan membuang data mentah yang tidak relevan, penyajian data (data display) secara naratif kronologis agar polanya mudah dipahami, serta tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi berkala guna menghasilkan temuan ilmiah yang objektif, kokoh, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar artikel jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Rabat Beton

Berdasarkan kerangka konseptual yang diadaptasi dari teori

bentuk partisipasi masyarakat oleh Huraerah (2011), keterlibatan warga di lokasi penelitian dianalisis melalui dua indikator utama yang mewujud secara nyata di lapangan, yaitu partisipasi buah pikiran atau gagasan dan partisipasi tenaga kerja fisik. Analisis mendalam terhadap dimensi partisipasi buah pikiran menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rendu Tutubhada telah berupaya menyediakan wadah formal secara institusional melalui penyelenggaraan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Forum tahunan ini didesain sebagai ruang publik yang mempertemukan seluruh elemen strategis desa, mulai dari jajaran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh pemuda, hingga perwakilan kelompok tani dari Dusun Paupada dan Dusun Tasikapa.

Berdasarkan penelusuran data dokumen daftar hadir dan notulensi Musrenbangdes, pemerintah desa di bawah kepemimpinan saat ini telah membuka ruang transparansi yang cukup lebar, di mana masyarakat diberikan kebebasan untuk menyalurkan kritik konstruktif, mengevaluasi capaian efektivitas program pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran sebelumnya, serta memperdebatkan urgensi prioritas pembangunan baru.

Namun demikian, apabila ditinjau dari aspek kedalaman substansi dan kesetaraan artikulasi politik, partisipasi buah pikiran ini masih menghadapi kendala struktural yang memicu terjadinya asimetri keterlibatan. Dinamika yang terekam selama proses wawancara mengindikasikan bahwa kontribusi ide, gagasan, dan formulasi usulan program di dalam forum Musrenbangdes masih sangat didominasi oleh aktor-aktor konvensional yang vokal, seperti para ketua RT/RW dan tokoh masyarakat senior yang memiliki kedekatan dengan elite birokrasi desa. Sebaliknya, mayoritas warga umum dan kelompok rentan cenderung bersikap pasif atau sekadar menjadi pendengar yang menyetujui keputusan akhir.

Fenomena pasivitas ini berakar dari adanya trauma psikologis-historis atau anggapan skeptis di kalangan akar rumput yang menilai bahwa usulan dari masyarakat bawah pada periode-periode kepemimpinan terdahulu jarang diakomodasi apabila berbenturan dengan kepentingan subjektif kepala desa. Dalam kacamata teori tangga partisipasi, realitas ini mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Rendu Tutubhada dalam tahap perencanaan baru menyentuh level konsultatif dan belum sepenuhnya naik kelas menuju tingkat kemandirian pengambilan keputusan kolektif yang ideal dalam tata kelola pemerintahan.

Sangat kontras dengan kondisi pada dimensi pemikiran, partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan fisik tenaga kerja justru memperlihatkan

capaian performa yang sangat luar biasa dan signifikan di lapangan. Pembangunan jalan rabat beton sepanjang 200 meter dan lebar 2 meter dengan alokasi anggaran Rp128.000.000 ini berhasil dimobilisasi melalui skema padat karya tunai yang inklusif. Pemerintah desa secara taktis membagi beban kerja fisik dengan melibatkan tenaga kerja lokal yang diatur secara bergilir antar-lingkungan RT dan RW di Dusun Paupada dan Tasikapa. Tingginya angka kehadiran fisik warga pada saat pelaksanaan gotong-royong pengecoran jalan mencerminkan kembalinya nilai-nilai solidaritas sosial mekanis yang sempat meredup.

Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi proyek, keterlibatan warga akar rumput tidak hanya terbatas pada peran operasional sebagai buruh kasar yang mengangkut material atau mencampur semen. Masyarakat desa secara kolektif memperlihatkan kapasitas inovasi lokal yang cerdas demi menyiasati keterbatasan waktu, di mana warga secara swadaya mengusulkan dan mengoperasikan alat pencampur material mekanis modern berupa mesin molen.

Penggunaan teknologi tepat guna ini berhasil menggantikan metode pengadukan manual pada masa lalu, sehingga mampu memangkas waktu penyelesaian proyek secara signifikan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan material semen, pasir, dan kerikil.

Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat

Tingginya grafik keterlibatan aktif warga desa dalam menyumbangkan tenaga dan waktu mereka untuk pembangunan fisik rabat beton ini distimulasi oleh dua faktor pendorong utama yang saling berkelindan, yaitu faktor kesempatan dan faktor kemauan. Ditinjau dari faktor kesempatan, hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya kemauan politik dan keterbukaan sistemik yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Rendu Tutubhada.

Aparatur desa di bawah kepemimpinan periode berjalan secara sadar menerapkan kebijakan pintu terbuka yang mengedepankan prinsip nondiskriminatif dan kesetaraan perlakuan. Setiap warga desa, tanpa memandang perbedaan faksi politik pasca-pemilihan kepala desa maupun status stratifikasi sosial di dusun, diberikan hak, ruang, dan kompensasi upah yang setara untuk mendaftarkan diri sebagai pekerja dalam proyek padat karya tersebut.

Pola komunikasi dua arah yang persuasif dan intensif yang dibangun oleh kepala desa bersama tokoh-tokoh kunci berhasil mengikis dinding pembatas psikologis masa lalu, membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah desa, serta melahirkan legitimasi kebijakan yang sangat kuat. Pola hubungan yang sehat ini secara otomatis menumbuhkan rasa kegotongroyongan

dan kepemilikan kolektif yang mendalam di sanubari warga, di mana mereka merasa dihargai sebagai mitra sejajar dalam pembangunan.

Di sisi lain, faktor kemauan bertindak sebagai motor penggerak internal yang berasal dari dalam kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masif warga dalam menyumbangkan tenaga kerja fisik murni didorong oleh kalkulasi rasional dan kesadaran sosio-ekonomi bahwa ketersediaan infrastruktur transportasi yang layak merupakan kebutuhan yang sangat mendesak demi kelangsungan hidup bersama, bukan lahir karena adanya tekanan struktural atau paksaan birokratis dari aparatur desa.

Masyarakat Dusun Paupada dan Tasikapa menyadari sepenuhnya bahwa rusaknya akses jalan antardusun selama bertahun-tahun telah menjadi faktor utama yang membelenggu potensi ekonomi mereka.

Dengan selesainya pembangunan jalan rabat beton ini, para petani lokal dapat dengan mudah, cepat, dan murah mengangkut hasil bumi mereka menuju pasar-pasar lokal tanpa harus khawatir komoditas pertanian mereka membusuk di jalan akibat hambatan geografis.

Kesadaran akan adanya keuntungan ekonomi langsung bagi kesejahteraan domestik rumah tangga inilah yang memicu tingginya motivasi intrinsik warga untuk rela bersusah payah di lapangan demi memastikan pengerjaan jalan tersebut selesai tepat waktu dengan kualitas yang prima.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Meskipun mobilisasi partisipasi fisik dalam pengerjaan jalan rabat beton ini secara umum dinilai sangat sukses, penelitian ini menemukan adanya beberapa residu hambatan mendasar yang bersifat struktural dan finansial yang membatasi kualitas partisipasi masyarakat secara holistik, yaitu hambatan ekonomi domestik dan alokasi waktu produktif serta keterbatasan kapasitas pendapatan swadaya finansial masyarakat.

Dari perspektif hambatan ekonomi dan alokasi waktu, mayoritas penduduk Desa Rendu Tutubhada menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian lahan kering tradisional dengan strata pendapatan ekonomi yang relatif rendah dan tidak menentu. Kondisi kerentanan ekonomi ini menciptakan dilema alokasi waktu bagi kepala keluarga, di mana mereka dituntut untuk secara kaku memprioritaskan curahan energi dan jam kerja harian mereka untuk mengolah ladang atau mencari nafkah tambahan di luar desa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pangan pokok keluarga sehari-hari.

Akibatnya, akumulasi waktu luang yang dimiliki oleh warga untuk menghadiri serangkaian rapat koordinasi desa atau diskusi perencanaan di luar jam pengerjaan fisik menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya mengorbankan kualitas

partisipasi buah pikiran mereka pada tahap awal siklus kebijakan pembangunan desa.

Hambatan struktural tersebut semakin diperparah oleh adanya keterbatasan pendapatan swadaya finansial yang dialami oleh entitas masyarakat secara kolektif. Rendahnya kapasitas tabungan domestik menyebabkan bentuk partisipasi masyarakat dalam wujud sumbangan materi atau donasi uang tunai untuk mendukung operasional pembangunan jalan rabat beton ini sama sekali tidak dapat diandalkan atau berada pada titik yang sangat minim. Realitas empiris ini memaksa proyek pembangunan jalan antardusun sepanjang 200 meter tersebut mutlak menggantungkan seluruh struktur pembiayaannya pada tingkat likuiditas dan ketepatan waktu transfer Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketergantungan fiskal yang teramat tinggi terhadap kontribusi vertikal pemerintah pusat ini menjadi catatan kritis dan sinyal peringatan bagi keberlanjutan tata kelola infrastruktur desa di masa depan.

Apabila di masa mendatang jalan rabat beton tersebut mengalami kerusakan skala kecil atau membutuhkan perawatan berkala, tiadanya dana swadaya masyarakat yang terhimpun berpotensi membuat kerusakan tersebut terbengkalai dalam waktu yang lama karena pemerintah desa harus menunggu kembali siklus penganggaran Dana Desa tahun berikutnya untuk melakukan perbaikan fisik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam, penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan rabat beton di Desa Rendu Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, berjalan secara asimetris atau belum merata pada setiap tahapan siklus pembangunan. Ketimpangan kualitas partisipasi ini terlihat sangat jelas ketika membandingkan keterlibatan warga pada dimensi non-fisik (buah pikiran) dengan dimensi fisik (tenaga kerja).

Pada tahapan perencanaan makro melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Pemerintah Desa sebenarnya telah berupaya membuka ruang publik secara transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif guna memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan warga untuk mengevaluasi program serta menyalurkan kritik konstruktif.

Namun demikian, pada realitasnya kontribusi buah pikiran, gagasan, dan artikulasi politik substantif masih sangat didominasi oleh aktor-aktor konvensional yang vokal, seperti para ketua RT/RW serta tokoh masyarakat senior yang memiliki kedekatan dengan lingkaran elite birokrasi desa.

Sebaliknya, mayoritas warga umum dan kelompok rentan cenderung bersikap pasif atau sekadar menjadi pendengar yang menyetujui keputusan akhir akibat adanya sisa trauma psikologis-historis serta anggapan skeptis masa lalu bahwa aspirasi dari kalangan bawah jarang diakomodasi apabila berbenturan dengan kepentingan subjektif pengambil kebijakan.

Kondisi yang sangat kontras dan memperlihatkan capaian performa luar biasa justru terjadi pada tahapan pelaksanaan melalui kontribusi fisik tenaga kerja. Pembangunan jalan rabat beton sepanjang 200 meter yang menghubungkan Dusun Paupada dan Dusun Tasikapa ini berhasil memobilisasi antusiasme dan solidaritas sosial masyarakat secara masif melalui skema padat karya tunai yang inklusif.

Keterlibatan aktif warga akar rumput tidak hanya sebatas menjadi buruh kasar, melainkan juga mewujud dalam kapasitas inovasi lokal yang cerdas, di mana warga secara swadaya mengusulkan dan mengoperasikan mesin mekanis berupa molen. Penggunaan teknologi tepat guna ini terbukti efektif dalam memangkas waktu penyelesaian proyek secara signifikan, meningkatkan efisiensi pencampuran material, serta menghasilkan mutu fisik jalan rabat beton yang jauh lebih kokoh dan berkualitas tinggi.

Secara komprehensif, dinamika naik-turunnya grafik partisipasi masyarakat di Desa Rendu Tutubhada ini dikendalikan oleh interaksi kuat antara faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong utama yang menstimulasi keterlibatan fisik warga meliputi faktor kesempatan yang diciptakan melalui kebijakan pintu terbuka (open-door policy) oleh pemerintah desa saat ini, serta faktor kemauan internal masyarakat yang didasari oleh kesadaran sosio-ekonomi rasional.

Warga menyadari sepenuhnya bahwa selesainya jalan rabat beton ini akan memberikan keuntungan ekonomi langsung bagi kesejahteraan domestik mereka, terutama dalam mempermudah, mempercepat, dan menekan biaya pengangkutan hasil komoditas pertanian lahan kering menuju pasar.

Di sisi lain, faktor penghambat utama yang membatasi kualitas partisipasi masyarakat bersumber dari hambatan ekonomi domestik dan alokasi waktu produktif. Mayoritas warga yang berpenghasilan rendah harus memprioritaskan seluruh energi harian mereka untuk bekerja di ladang demi menjamin pemenuhan pangan pokok keluarga, sehingga waktu luang untuk menghadiri rapat-rapat perencanaan desa menjadi sangat terbatas.

Hambatan ini diperparah oleh keterbatasan pendapatan swadaya finansial masyarakat yang menyebabkan proyek bernilai Rp128.000.000 ini mutlak menggantungkan seluruh struktur

pembiayaannya pada kucuran Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang memicu risiko ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap keberlanjutan perawatan infrastruktur desa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Afdal, A., Mappamiring, M., & Hakim, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanah Towa. Jurnal Administrasi Publik, 19(1), 45-56.

Brata, A., Jawiah, J., & Darlis, D. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Waeputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana. Jurnal Ilmu Pemerintahan Lokal, 3(1), 12-25.

Fatmawati, F., Hakim, A., & Mappamiring, M. (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen, 8(2), 115-128.

Huraerah, A. (2011). Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Komunitas. Bandung: Humaniora.

Ismawati, I., Nugraha, A., & Bangas, J. (2023). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Bangkit Baru Kabupaten Barito Kuala. Jurnal Pengabdian Komunitas, 5(2), 88-99.

Juliana, J., & Priyanti, E. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Jurnal Pembangunan Wilayah, 11(3), 201-214.

Mulyantika, R., & Adi, I. R. (2021). Man-Centered Development: Evaluasi Keterlibatan Warga dalam Kebijakan Lokal. Jurnal Kesejahteraan Sosial, 7(2), 140-153.

Nugraha, A., & Bangas, J. (2024). Analisis Upaya Terkoordinasi Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Aspirasi Masyarakat Pasca-Desentralisasi. Jurnal Administrasi Negara, 12(1), 34-47.

Sudjana, S. (2018). Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. Jurnal Ketahanan Nasional, 24(2), 135-151.